

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
( Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kota Pematangsiantar)**

**Menrokis Purba<sup>1)</sup>, Restu Agusti<sup>2)</sup>, Rofika<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

*Email : [menrokispurba@gmail.com](mailto:menrokispurba@gmail.com)*

*The Influence Of The Presentation Of Financial Statements, Internal Control  
System And Accessibility Of Financial Reports On Regional Financial  
Management Accountability  
(Empirical Study on OPD Pematangsiantar City Government)*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the presentation of financial statements, internal control systems and accessibility of financial reports on the accountability of regional financial management. The population of this research is 23 opd in Pematangsiantar city government. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data were processed using SPSS version 25 and analyzed using multiple linear regression analysis. The dependent variable in this study is the accountability of regional financial management. The independent variables used in this study are the presentation of financial statements, the internal control system and the accessibility of financial statements. The results of this study indicate that the presentation of financial statements affects the accountability of regional financial management at a significance level of  $0.001 < 0.05$ , the internal control system affects the accountability of regional financial management at a significance level of  $0.000 < 0.05$ , the accessibility of financial statements affects the accountability of regional financial management. at a significance level of  $0.006 < 0.05$ .*

*Keywords : the effect of financial statement presentation, internal control system, accessibility of financial reports and accountability of regional financial management.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor publik dewasa ini yang semakin menguatnya tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dimana terdapat tuntutan kepada akuntansi sektor publik agar

memberikan informasi kepada publik dan dilakukan secara transparan . Dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mengetahui pengelolaan keuangan dan juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya (Saragih, 2015). Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah).

Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus melakukan perubahan dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Berdasarkan surat BPK perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019 Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyeteroran ke kas daerah. Hal ini sebagai bukti bahwa LKPD Kota Pematangsiantar yang sebelumnya mendapatkan opini WTP namun pada tahun 2019 mendapatkan opini WDP karena masih ditemukan catatan kelemahan.

Dilihat dari fenomena yang terjadi masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan

daerah. Sehingga pemerintah daerah harus mengatasi hal tersebut dengan meakukan peningkatan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut, maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan faktor tersebut diantaranya adalah penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam

laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian laporan keuangan menurut beberapa para ahli :

menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:1): Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah: Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

## **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Wahida, 2015)

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah usaha dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerja atau operasional yang dilakukan oleh suatu entitas.

## **Penyajian Laporan Keuangan**

Bastian (2010:297) laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Nordriawan, 2012: 33).

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia IAI dalam PSAK No. 1 Tahun 2015

menyatakan tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset

Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

2. Liabilitas

kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumberdaya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Ekuitas

ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomik masa datang. Karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur.

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

5. Kontribusi dari dan distribusi pemilim dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan

6. Arus kas

Arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dan tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017:4). Sedangkan menurut Mustofa (2012:3) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan

laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan terkait kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah, antara lain: (Riayani, 2014 : 4)

- a. Ketersediaan informasi laporan keuangan Hal yang paling utama dalam aksesibilitas laporan keuangan daerah yaitu adanya laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adanya laporan keuangan dapat membantu pihak yang membutuhkan untuk untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.
- b. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
- c. Media publikasi laporan keuangan

### **Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif akuntabilitas pengelolaan keuangan. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu (Kartika, 2015). Wulansari (2014) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan baik secara parcial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar

## **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006). Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Wahida (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun masih ada kelemahan dimana menurut hasil penelitiannya proses penyampaian, penyebarluasan, dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 23 OPD Pemerintah Kota Pematangsiantar. 23 OPD tersebut terdiri dari 2 sekretariat, 5 badan dan 14 dinas. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah

melaksanakan seminar proposal.

### **Populasi dan sampel**

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini karakter sampel pada penelitian ini yaitu OPD Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dengan jumlah sampel 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).. Adapun kriteria pengambilan sampel yaitu: Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di kota pematangsiantar sebagai penanggungjawab laporan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 46 (empat puluh enam) orang dari 23 (dua puluh tiga) OPD yang masing-masing OPD ada 2 (dua) responden yaitu Kepala Dinas Dan Kepala Bagian Keuangan.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Dependen (Y):**

Proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Indikatornya adalah :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

### Variabel Independen (X1):

Penyajian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No 71 Tahun 2010). Indikatornya yaitu :

1. Relevan
  2. Andal
  3. Dapat dibandingkan
  4. Dapat dipahami
- (PP No 71 Tahun 2010).

### Variabel Independen (X2):

Sistem pengendalian intern adalah Suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) dalam pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan.
  2. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.
  3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
- (Krismiaji, 2015) Indikatornya yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
  2. Penilaian resiko
  3. Kegiatan Pengendalian
  4. Informasi dan Komunikasi
  5. Pemantauan
- (Krismiaji, 2015).

### Variabel Independen (X3):

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk

memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. (Superdi, 2017) Indikatornya yaitu :

1. Terbuka di media masa.
  2. Mudah di akses.
  3. Ketersediaan Informasi.
- (Superdi, 2017)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	44	3	5	4,4728	0,5309
Sistem Pengendalian Internal (X2)	44	3	5	4,5290	0,5454
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	44	2	5	4,2029	0,7817
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	44	4	5	4,6646	0,4721
Valid n (listwise)	44				

**Sumber:** Hasil Data Olahan (2021)

Berdasarkan *output* SPSS pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah data (*valid n*) yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 44 sampel yang berasal dari hasil kuisioner yang disebarkan peneliti pada OPD Kota Pematangsiantar. Dengan demikian,

semua data sampel yang diperoleh dapat diolah sebagai data penelitian.

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Reliabilitas mencakup stabilitas ukuran dan konsistensi intern ukuran. Stabilitas ukuran adalah kemampuan instrument untuk tetap stabil atau tidak rentan terhadap situasi apapun. Kestabilan ukuran membuktikan kebaikan ukuran dalam mengukur suatu konsep. Suatu kontrak atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,06 (Kuncoro, 2013:181).

Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,756	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,790	0,6	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,809	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,849	0,6	Reliabel

**Sumber:** Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel penyajian laporan keuangan (X1) adalah sebesar 0,756, sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,790, variabel aksesibilitas laporan keuangan (X3) sebesar 0,809 dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)

adalah sebesar 0,849. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrument kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel.

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0365977
	Std. Deviation	129,170,069
Most Extreme Differences	Absolute	0,115
	Positive	0,115
	Negative	-0,096
Test Statistic		0,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,170 <sup>c</sup>

**Sumber:** Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

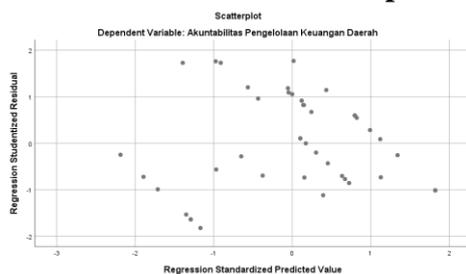
Berdasarkan tabel hasil uji kolmogrov-smirnov di atas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,170 > 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hasil perhitungan nilai tolerance bahwa seluruh variabel dalam independent yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah bebas dari multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Gambar 1 Grafik Scatterplot**



**Sumber:** Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Dari tabel hasil uji glejser di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel penyajian laporan keuangan (X1) adalah sebesar 0,447, variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,431 dan variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan signifikansi sebesar 0,697. Nilai signifikansi seluruh variabel independent memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, dari gambar grafik scatterplot juga dapat diketahui bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar dan tidak membentuk

suatu pola tertentu yang teratur. Sehingga, berdasarkan dua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik seperti tertera pada ringkasan tabel 4.5 diatas diperoleh persamaan model regresi yaitu :

$$Y = 3,559 + 0,348X_1 + 0,297X_2 + 0,361X_3 + 0$$

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,559 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 3,559.
2. Nilai koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,348 menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,348.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,297 menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,297.
4. Nilai koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,361 menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan aksesibilitas laporan keuangan

sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,361.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Rentang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila  $R^2$  besar maka menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,839	0,704	0,682	1,33850

**Sumber:** Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau adjusted  $R^2$  dalam penelitian ini adalah sebesar 0,682. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 68,2%, sedangkan sisanya 31,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena Nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar  $3,623 >$  nilai t tabel  $2,02108$ .
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena Nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar  $3,838 >$  nilai t tabel  $2,02108$ .
3. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena Nilai t hitung variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar  $2,872 >$  nilai t tabel  $2,02108$ .

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan oleh kesibukan responden, pandemi covid 19 dan kendala dengan lokasi. Semua responden tidak dapat

menyanggupi untuk menjawab kuesioner secara langsung dan meminta waktu beberapa hari. Kendala ini menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik. Juga, peneliti tidak dapat secara langsung menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner.

2. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisisioner sebagian besar masih menggunakan kuisisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **A. Saran Operasional**

1. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Pemerintah Kota Pematangsiantar, khususnya dalam segi pelaksanaan, sebaiknya proses pelaksanaan belanja modal lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pemahaman setiap pegawai di instansi pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah dan menindak tegas pegawai yang melanggar atau tidak sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah agar laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pemerintah Kota Pematangsiantar juga diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih diawasi oleh DPRD agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta masyarakat dapat merasakan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi yang ada di pemerintah di Kota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Kota Pematangsiantar juga diharapkan lebih meningkatkan dalam memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan melalui pengumuman di kantor-kantor OPD, media cetak maupun internet.

### **B. Saran Akademis**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyebarkan kuesioner secara langsung dan menjelaskan sedikit terkait variabel penelitian sehingga responden dapat menanyakan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan dapat memahami maksud dari pernyataan kuesioner.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisisioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat.
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal akuntansi dan auditing*, 8(2), 137–150.
- Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.18382/jraa.m.v1i2.18>
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Kartika, C.D. 2015. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Stres Akademik Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Wahyuni, P. S., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, N., & Herawati. (2014). Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap ( Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Wulansari, 2014 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Survey pada Dinas Kota Bandung), *Repository Universitas Widyatama, Bandung*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  
2010 tentang Standar  
Akuntansi Pemerintahan.

([https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps\\_i\\_2019\\_1568693769.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2019/I/ihps_i_2019_1568693769.pdf))

Undang-undang Nomor 17 Tahun  
2003 tentang Keuangan  
Negara.